

# SUNAN GIRI DALAM LEGITIMASI KEKUASAAN MATARAM PADA BABAD TANAH JAWI

M. Ilham Wahyudi  
UIN SunanAmpel Surabaya

Korespondensi: [muh.ilhamwahyudi@gmail.com](mailto:muh.ilhamwahyudi@gmail.com)

## ABSTRACT

Sunan Giri was the Islamic priest in Java who had enough enormous influence especially in 15-17 th AD century. The name of “Sunan Giri” is not limited referring to Raden Paku (Sunan Giri I) who started the political entity of Giri Kedhaton, but also refers to almost all of the sunans from Giri who are also descendants of Sunan Giri I. The Babad Tanah Jawi (BTJ) as a historical literature book of the Mataram palace in addition to telling the history of Java from the pre-Demak era to Mataram, on the other hand also mentions a lot about the existence of Sunan Giri. This research seeks to reveal the legitimacy narratives of the Islamic Mataram Kingdom in BTJ involving Sunan Giri as a religious figure who can exert political influence on them. By using a qualitative-descriptive method, the writer analyzes the text data of BTJ's narratives that contain elements of legitimacy involving Sunan Giri. From the philological data, it is then balanced with historical data from several historical works to find out how the socio-political conditions occurred in the 15th-17th century AD, especially in Java. The mention of legitimacy related to Sunan Giri in BTJ occurred in the early of Demak, early of Pajang, early until the mid of Mataram. Those stories are closely related to the existence of Sunan Giri as a priest with enormous influence both in Java and outside Java. Therefore, BTJ, which contains such information, has become one of the media for the legitimacy of power by the kings of Mataram.

**Keywords:** *Sunan Giri; Mataram; Babad Tanah Jawi*

## ABSTRAK

Sunan Giri ialah seorang rohaniwan Islam di Jawa yang memiliki pengaruh cukup luas khususnya pada abad ke-15-17 M. Nama “Sunan Giri” tidak hanya mengacu pada “Raden Paku” (Sunan Giri I) yang mengawali entitas politik Giri Kedhaton, namun juga mengacu kepada hampir seluruh sunan yang berasal dari Giri yang juga keturunan dari Sunan Giri I. Babad Tanah Jawi (BTJ) sebagai kitab sastra sejarah istana Mataram selain mengisahkan mengenai sejarah Jawa pada era pra Demak hingga Mataram, di lain sisi juga banyak menyebut tentang keberadaan Sunan Giri. Penelitian ini berusaha mengungkap narasi-narasi legitimasi Kerajaan Mataram Islam dalam BTJ yang melibatkan Sunan Giri sebagai seorang tokoh agama yang dapat memberi pengaruh politis pada mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif penulis menganalisa data teks narasi-narasi BTJ yang mengandung unsur legitimasi yang melibatkan Sunan Giri tersebut. Dari data filologis itu kemudian diimbangi pula dengan data-data historis dari beberapa karya sejarah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosio-politik yang terjadi pada kisaran abad ke-15-17 M, khususnya di Pulau Jawa. Penyebutan legitimasi yang berkaitan dengan Sunan Giri dalam BTJ terjadi pada masa awal Demak, awal Pajang, awal hingga pertengahan Mataram. Kisah-kisah tersebut sangat berkaitan dengan keberadaan Sunan Giri sebagai seorang rohaniwan dengan pengaruh yang sangat besar baik di Jawa maupun luar Jawa. Oleh karena itu BTJ yang memuat informasi-informasi demikian menjadi salah satu media pengabsahan kekuasaan oleh raja-raja Mataram.

**Kata Kunci:** *Sunan Giri; Mataram; Babad Tanah Jawi*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah berdirinya monarki-monarki di tanah Jawa sejak masa Hindu-Budha hingga Islam, terdapat berbagai cara atau metode yang digunakan oleh para raja Jawa untuk menegakkan kekuasaan mereka. Cara-cara ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah persepsi keabsahan atau validitas kekuasaan seorang pemimpin yang sedang memerintah di mata publik. Dengan kata lain bisa dikenal dengan “legitimasi”. Legitimasi politik ini digunakan sebagai sarana pendukung kekuasaan sebelum seorang pemimpin atau raja itu berkuasa maupun sebagai upaya mempertahankan kekuasaan di saat ia sudah berkuasa, atau bahkan untuk merebut kekuasaan.

Tidak jauh berbeda dengan cara-cara legitimasi kekuasaan pada masa Jawa Kuno. Pada umumnya legitimasi kekuasaan di masa Mataram Islam bisa dibedakan dalam beberapa hal seperti, penghubungan silsilah, jatuhnya pulung atau wahyu keraton, pembuatan karya sastra sejarah istana,

penggunaan gelar, relasi dengan rohaniwan, dan prestasi-prestasi seorang raja saat ia memerintah. Jika mengacu pada teori Max Weber tentang otoritas kekuasaan maka kita akan menemukan tiga macam otoritas yaitu tradisional, kharismatik dan legal-formal. Tradisional ialah otoritas yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisi dan agama dalam sebuah entitas negara. Kharismatik ialah otoritas yang didapatkan karena kepemilikan citra yang unggul seorang pemimpin di mata masyarakat. Sedangkan otoritas legal-formal ialah kekuasaan yang didapatkan berdasarkan cara-cara atau aturan negara yang sah dan berlaku saat itu. Jika dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan monarki-monarki di Jawa pada masa lalu baik masa Hindu-Budha maupun Islam, pada dasarnya otoritas Weber akan mengacu pada dua buah hal yaitu tradisional dan kharismatik yang didasarkan pada karakteristik monarki-monarki pada masa kuno. Otoritas tradisional dapat terilustrasikan dalam cara suksesi pemimpin mereka yang turun-temurun baik oleh putra maupun saudara seorang raja yang wafat atau lengser, juga pada kasus kultur dan agama sebuah kerajaan. Sedangkan kharismatik dapat terilustrasikan pada citra raja saat memerintah saat itu entah raja itu sebenarnya berkharisma atau pun tidak namun pada intinya ia menggunakan beberapa perangkat untuk membuat dirinya sendiri tampak memiliki nilai-nilai lebih di mata masyarakat.

Pada masa Hindu-Budha, untuk membuktikan bahwa seorang raja itu keturunan dari raja-raja sebelumnya atau termasuk dari golongan keturunan orang-orang hebat, ia mengungkapkan silsilahnya dalam prasasti. Airlangga pada prasasti Pucangan menyatakan bahwa dirinya keturunan dari raja-raja hebat sebelumnya, dari jalur ayah berasal dari raja Udayana dari Bali sedangkan dari jalur ibu ditarik tiga ke atas ia keturunan dari Mpu Sindok, seorang raja Mataram Kuno yang berkuasa pada periode Jawa Timur (Witasari 2009, lampiran 7-8). Sedangkan pada saat Wijaya mengawali dinastinya, bukannya ia membuat sebuah dinasti baru, namun ia menyatakan bahwa ia masih bagian dari dinasti pendahulunya yaitu Rajasa, dinasti yang didirikan oleh Ken Arok di Singhasari seperti yang tergambar dalam prasasti Kertarajasa bertarikh 1305 M (Muljana 2011, 125). Cara-cara penghubungan silsilah seperti itu masih berlanjut pada masa Islam dan semakin menjadi-jadi dengan sinkretisasi dengan kultur Hindu-Budha. Pada masa Islam tradisi dalam pembuktian atau membenaran akan leluhur-leluhur bangsawan ini beralih media kepada karya sastra dalam bentuk babad maupun serat. Dalam bab-bab awal dari *Babad Tanah Jawi* (BTJ) dijelaskan bahwa Nabi Adam menurunkan Nabi Sis kemudian menurunkan sejumlah nama-nama dewata Hindu, dilanjutkan nama-nama tokoh pewayangan hingga raja-raja Jawa Kuno seperti Brawijaya ke-V dan terus menurun kepada raja-raja di Mataram Islam. Selain itu ada pula ide pulung atau wahyu keraton, yang biasanya berupa cahaya yang jatuh pada si calon suksesor. Schrike menyebutnya dengan *royal kasèktèn* atau *magic power* (Schrike 1957, 8), yang pada kasus masa Jawa Kuno dapat dilihat pada kasus Arok, yang dilukiskan dalam Pararaton sebagai seorang bayi yang lahir dengan cahaya. Sedangkan di masa Islam dapat mengambil contoh pada saat Raden Mas Rahmat ingin merebut takhta Pangeran Puger ia dikisahkan mendapat wahyu dari langit dan ia pernah bermimpi bahwa kakeknya, Sultan Agung, dulu hormat padanya saat ia masih dalam kandungan yang menandakan kelak akan menjadi seorang raja (Moedjanto 1987, 179). Dalam membentuk sebuah citra adikodrati, biasanya seorang raja menggunakan gelar-gelar yang diasosiasikan pada kekuatan supranatural maupun makna-makna yang superior. Seperti pada gelar raja-raja masa Hindu-Budha mereka menggunakan gelar abhiseka yang mengandung nama dewata sesembahan mereka, sebagai contoh nama-nama abhiseka raja-raja periode Kediri yang mengandung nama Dewa Wisnu. Pada masa Islam pun, meski pengagungan pada dewata sudah tiada namun tidak mengurangi kebesaran nilai-nilai pada gelar seperti pada gelar raja-raja Mataram misalnya, *Hamengkubuwana* (memangku bumi), *Pakubuwana* (pakunya bumi), *Mangkunegara* (memangku negara), dan *Pakualam* (pakunya alam). Dari beberapa legitimasi tersebut, ada lagi sebuah legitimasi yang cukup ampuh, legitimasi ini berkaitan dengan sosok rohaniwan yang berpengaruh baik dalam kehidupan sosial, religi maupun kenegaraan.

Di mana pun kedudukan rohaniwan sebagai penyampai pesan-pesan suci agama ditempatkan pada kedudukan yang terhormat oleh masyarakat. Mengingat kedudukannya yang amat penting di antara masyarakat itu, maka penggunaan legitimasi yang berkaitan dengan rohaniwan diharapkan

menjadi pondasi kekuasaan yang dapat merangkul khalayak ramai. Pada masa Hindu-Budha, kedudukan rohaniwan cukup ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Mengingat pada peradaban saat itu agama Hindu mengenal sistem kasta, maka kasta yang tertinggi diduduki oleh kaum brahmana atau pemimpin keagamaan Hindu saat itu. Oleh karena itu sudah tidak diragukan kembali bagaimana gambaran orang-orang suci yang selalu mendampingi dan mendukung kehadiran seorang raja dalam memimpin sebuah negara. Dalam Pararaton dijelaskan ketika raja Kadiri, Prabu Kertajaya murka karena ia diberontak oleh Ken Arok, kemudian ia menyatakan diri sebagai Bhataru Guru. Aksinya itu disusul dengan pemaksaan kepada para brahmana untuk menyembahnya. Namun mereka tidak berkenan, yang kemudian mereka melarikan diri ke Tumapel (Soekmono 1981, 61). Sikap Prabu Kertajaya terhadap para brahmana itu mencerminkan keinginannya agar disokong oleh kaum rohaniwan. Hal ini mengarah pada ilustrasi betapa besar pengaruh kaum rohaniwan atas kekuasaan para politikus saat itu, sehingga mereka dipaksa untuk mengakui keunggulan seorang raja. Apabila kita kembali pada karakteristik monarki-monarki pada masa kuno kita akan mendapati bahwa sistem kepercayaan atau religi sangat berpengaruh dalam kehidupan politik mereka. Penjelmaan dewa yang menitis kepada seorang raja, penggunaan nama-nama dewa dalam nama raja, dan kehadiran para brahmana di samping raja ialah contoh daripada nilai-nilai kepercayaan saat itu yang teraplikasikan dalam alam kekuasaan.

Ketika periode sejarah Indonesia di Jawa memasuki abad ke-15 M, saat itu secara perlahan peradaban yang pernah meliputi Pulau Jawa selama berabad-abad lamanya mulai mengalami masa redupnya dan pada akhirnya benar-benar runtuh. Di awal abad ke-16 dengan munculnya Kerajaan Demak, menandai sebuah kemunculan entitas politik besar dalam suasana peradaban baru, yang saat itu mulai melebarkan sayapnya di berbagai tempat di Jawa. Tidak sampai genap seabad, Demak kemudian digantikan Pajang yang berpusat di dekat aliran Sungai Bengawan Solo. Lebih singkat lagi Pajang hanya memiliki satu raja terkenal yaitu Jaka Tingkir atau lebih dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Sedangkan pada masa penerusnya yaitu Pangeran Benawa, Pajang sudah masuk wilayah bawahan Mataram. Saat itu Mataram yang merupakan penerus Demak dan Pajang menjadi kerajaan yang mengawali peradaban Jawa yang panjang di masa Islam. Pada masa Mataram inilah kebudayaan Jawa dari berbagai aspek mulai menunjukkan bentuknya dan pada umumnya embrio-embrio tersebut terbentuk pada masa Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung ini berbagai kebijakan kebudayaan terjadi, seperti halnya pembuatan kalender Jawa yang memadukan unsur Islam dan Jawa, penulisan sastra Serat Sastra Gendhing, penciptaan tataran ngoko-krama dalam bahasa Jawa, pembaharuan perayaan Grebeg, penabuhan gamelan Sekaten, pembuatan sastra babad dan lain-lain (Moedjanto 1987, 59). Dari berbagai unsur kebudayaan tersebut ada salah satu yang kemudian dijadikan sebagai alat politik untuk melegalkan dinasti mereka yaitu penulisan karya sastra sejarah atau babad khususnya Babad Tanah Jawi, yang mengisahkan sejarah panjang tanah Jawa terutama pasca runtuhnya Majapahit hingga masa Mataram di Kartasura menurut perspektif pengarang babad. Namun pada dasarnya peristiwa-peristiwa dalam babad tidak semuanya fiktif, ada berbagai peristiwa yang cocok dengan sumber-sumber pendukung lain. Terlepas dari hal tersebut, pembahasan ini mencermati pada unsur-unsur legitimasi rohaniwan dari Giri dalam babad yang pengaruhnya cukup penting dalam berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa khususnya Demak, Pajang hingga Mataram.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitiannya, Abdul Chalik (2016) mengatakan bahwa kedudukan rohaniwan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dahulu begitu penting. Rohaniwan yang dikenal dengan sebutan “wali” ini memegang kekuasaan kharismatik yang teraplikasikan dalam dual fungsi, yang pertama ia sebagai raja atau pemimpin sebuah entitas politik atau monarki saat itu, sedangkan yang kedua ia memiliki pengaruh sosio-religi di masyarakat (Abdul Chalik 2016, 146). Oleh karena itu betapa pentingnya peran seorang rohaniwan dalam masyarakat saat itu, bahkan hingga sekarang yang dapat memberi pengaruh kekuasaan bagi para politikus.

Sedangkan Rizal Zamzami (2018) menguraikan bahwa kedudukan rohaniwan atau wali pada masa Islam di Jawa selalu mendampingi berkuasanya seorang raja. Pada masa Demak para wali dideskripsikan seorang tokoh agama yang besar pengaruhnya yang tak hanya pada menguasai pada sektor keagamaan namun juga pada politik serta budaya. Senada dengan ulasan di atas, ia juga menambahkan bahwa kedudukan wali yang begitu tinggi baik pada masyarakat maupun keraton menjadikan segala nasihat dan restu mereka patut dipertimbangkan oleh seseorang yang menduduki takhta. Dan memang pada penelitian ini hal pokok yang menjadi pembahasan ialah *dhawuh* atau sabda salah satu wali yang berbentuk ramalan yang selalu merestui berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pasca Majapahit khususnya Mataram.

Ramalan seorang wali ini berasal dari Sunan Giri, yang selalu menjadi legitimator berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa dan hal tersebut tercantum dalam Babad Tanah Jawi (BTJ). Babad Tanah Jawi ini merupakan kitab sastra istanasentris, sehingga dalam kitab tersebut banyak ditemukan unsur-unsur legitimatis bagi berdirinya sebuah dinasti. Dalam tulisannya, Muhammad Iqbal Birsyada (2016) menyatakan bahwa Babad Tanah Jawi dalam perspektif *critical pedagogy* menunjukkan dominasi budaya istana (*cultural empire*). Dominasi itu ditunjukkan lewat kisah-kisah mitos, magis, dan *supranatural* untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat (Birsyada 2016, 183). Artinya Babad Tanah Jawi sebagai alat politik yang ampuh pada masyarakat tradisional saat itu, kisah-kisah yang disajikan dalam babad tersebut memang mengilustrasikan banyak keberpihakan pada istana namun bukan berarti BTJ sama sekali tidak bisa digunakan sebagai suatu sumber historiografi. Sarjana seperti H. J. de Graaf merupakan sarjana Belanda pertama yang mengolah data menggunakan BTJ sebagai sumber primer historiografi yang dibarengi dengan sumber-sumber kolonial sebagai penyeimbang agar narasi yang terolah dapat objektif (Ras 1987, 346).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sastra babad sebagai salah satu alat politik yang ampuh untuk menegakkan kekuasaan seorang raja. Babad dalam bahasa Jawa berarti membuka sebuah lahan yang rimbun dengan tanaman untuk digunakan keperluan manusia. Kemudian istilah itu digunakan sebagai nama kitab sastra sejarah yang mengisahkan tentang pembukaan sebuah daerah hingga perjalanan sebuah dinasti yang didirikan pada wilayah tersebut. J. J. Ras dalam *Masyarakat dan Kesusastraan di Jawa* menuliskan alur genealogis dari BTJ yang sebenarnya berasal dari gabungan beberapa babad yang terus mengalami revisi dan penambahan di masa yang berbeda. Penambahan Seda ing Krapyak menurutnya mengutus Carik Panjang Mas untuk menulis kembali Babad Demak. Setelah Babad Demak disalin kembali dan dibumbui kisah-kisah pendirian dan penghubungan silsilah Senapati atas Majapahit yang sebelumnya sudah tercantum pada Babad Demak maka kemudian lahirlah Babad Mataram (Ras 2014, 263). Dari Babad Mataram yang mulai dirintis oleh Krapyak ini kemudian mengerucut menjadi Babad Tanah Jawi, yang menurut Moedjanto untuk pertama kali disusun pada masa Sultan Agung (Moedjanto 1987, 59). Sedangkan menurut Hosein Djajadiningrat, pada periode tahun-tahun sebelum 1677, BTJ disusun oleh Pangeran Adi Langu II. Setelah ibukota Mataram berpindah ke Kartasura, BTJ dilanjutkan oleh Carik Bajra 1677-1718, tepatnya setelah masa penulisan Pangeran Adi Langu II. Namun Pangeran Adi Langu II juga sedikit berperan kembali beberapa tahun setelah 1705. Kemudian terakhir pada masa Paku Buwana III, BTJ dilanjutkan kembali, kemungkinan juga oleh Carik Bajra yang mengisahkan Keraton Kartasura dari tahun 1718-1743 (Soedjatmoko 2007, 123).

Sejarah Sunan Giri serta keturunannya telah banyak dipaparkan baik secara biografis maupun secara global dalam berbagai karya sejarah dengan tema-tema seperti: islamisasi Nusantara, sejarah Islam di Jawa, sejarah Walisongo, sejarah Mataram dan sebagainya. Secara biografis mereka dijelaskan sebagai aktor-aktor penting dalam konversi agama di Nusantara pada abad ke-15-17 an, sedang dalam paparan global mereka merupakan bagian penting dari peradaban Nusantara pada periode Islam yang turut serta dalam pencatatan politik di tanah Jawa. Mengambil dari salah satu sisi lain, penelitian ini penulis memfokuskan kisah Sunan Giri I dan keturunannya lebih kepada sebuah sumber filologis yaitu Babad Tanah Jawi. Dari data filologis tersebut, memberikan serta menguatkan gambaran mengenai posisi Sunan Giri yang selama ini dikatakan sebagai tokoh agama ternama pada

saat itu, yang memegang pengaruh besar baik dari segi politik maupun sosio-religi. Seperti yang dikatakan Birsyada, BTJ merupakan kitab sastra sejarah yang didominasi budaya istana, keberadaan narasi Sunan Giri selalu hadir dalam setiap periode naiknya sebuah entitas politik dan perestuan-perestuan bertakhtanya seorang raja, maka dalam analisa selanjutnya hal ini mengungkap BTJ sebagai media politik para raja Mataram.

### 3. METODE

Metode yang digunakan untuk mengolah penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ialah metode yang menekankan pada perolehan data di tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Pada metode ini peneliti langsung terlibat dalam pengumpulan data hingga analisa dan interpretasi data (Raco 2010, 56-57). Peneliti mengandalkan sumber utama yaitu Babad Tanah Jawi edisi Meinsma. Naskah BTJ Meinsma ini sudah dalam transliterasi yang telah diterbitkan oleh Penerbit Garudawaca pada tahun 2014.

Sedangkan pendekatan deskriptif bermakna penyajian data dengan mengandalkan data berupa teks (Raco 2010, 60). Melalui cara ini hasil analisis data dilakukan dengan penyajian kalimat-kalimat dalam babad yang mengandung unsur legitimasi Sunan Giri kepada kerajaan-kerajaan di Jawa dari Demak, Pajang dan khususnya Mataram. Unsur-unsur legitimasi yang tercantum dalam babad itu terutama pada saat episode suksesi kerajaan atau pergantian monarki seperti pada saat runtuhnya Majapahit dan pusat kekuasaan berpindah ke Demak, kemudian ketika Demak runtuh berpindah ke Pajang hingga saat Pajang runtuh kemudian pindah ke Mataram.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Teks dan Terjemahan

#### 4.1.1. Runtuhnya Majapahit

Kehadiran sosok Sunan Giri dalam BTJ sebelum sampai pada kronologi Mataram terlebih dahulu ditampilkan pada periode Demak yang kasusnya sebenarnya tidak jauh dengan apa yang terjadi pada kasus Mataram. Dalam periode Demak ini, Sunan Giri sudah memberikan legitimasi kepada kerajaan Islam terbesar pertama di Jawa itu. Peristiwa runtuhnya Majapahit yang menjadi pembatas zaman, dalam BTJ sudah terlihat dibumbui dengan unsur-unsur legitimasi seperti yang terlukiskan dalam redaksi berikut:

*“Adipati Bintara nuntên lumêbêt dhatêng ing kadhaton. Sangêt eramipun, déné botên kêpanggih tiyang satunggil-tunggila. Muwun salêbêt ing galih. Nuntên medal saking kadhaton, kondur dhatêng ing Bintara kaliyan bantu saprajuritipun. Sarawuhe ing Bintara Sunan Ngampel Denta ngandika dhatêng Dipati ing Bintara, andikakaken jumeneng ratu wonten ing Majapait, ingkang dados warisipun. Ananging Sunan Giri badhe nyêlani jumeneng ratu Majapait, laminipun kawan dasa dinten, nyarati, supados icala labetipun ratu kapir.”* (BTJ-Jalidu ed. 2014, 29)

“Adipati Bintara (Raden Patah) kemudian masuk ke dalam istana. Ia sangat heran, bahwasanya tidak menemui satu pun orang di sana. Ia menangis di dalam hati. Kemudian keluar dari istana, pulang ke Bintara bersama para pengiring serta prajuritnya. Dan setelah tiba di Bintara, Sunan Ampel berkata kepada Adipati Bintara dan memerintahkan untuk segera naik takhta di Majapahit, yang telah menjadi warisannya. Namun Sunan Giri menyelang naik takhtanya Adipati Bintara sebagai raja Majapahit selama 40 hari, untuk meruwat, agar hilang bekas (unsur-unsur) dari raja kafir.”

#### 4.1.2. Penobatan Raja-Raja Pra-Mataram

Raja-raja yang bertakhta pada kerajaan-kerajaan sebelum berdirinya Mataram dalam BTJ dikisahkan selalu direstui oleh Sunan Giri saat penobatannya, terkhusus pada raja-raja yang mengawali sebuah monarki atau dalam kata lain raja pertamanya. Sebelum berdirinya Mataram, jika ditarik garis lurus ke belakang maka sebelum Mataram ada dua entitas monarki yang mendahuluinya yaitu Demak dan Pajang. Sedang dari kedua monarki tersebut raja pertamanya masing-masing ialah, Raden Patah dan Hadiwijaya. Raden Patah dinobatkan sebagai raja baru di Demak setelah Sunan Giri menghilangkan unsur “kekafiran” selama 40 hari.

*“Sarêng angsal kawan dasa dintên, Sunan Giri nuntên pasrah karaton dhatêng Raden Patah. Raden Patah lajeng jumênêng ratu wontên ing Demak, ngerèh ing tanah Jawi sêdaya, ajêjuluk Senapati Jimbun Ngabdur Rahman Panêmbahan Palembang Saidin Panatagama.”* (BTJ-Jalidu ed. 2014, 29-30)

“Setelah empat puluh hari, Sunan Giri kemudian memasrahkan keraton kepada Raden Patah. Raden Patah kemudian diangkat menjadi raja di Demak, memerintah atas tanah Jawa seluruhnya, dan ia diberi gelar Senapati Jimbun Ngabdur Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama.”

Kemudian ketika Demak runtuh dan digantikan Pajang, sama halnya Raden Patah yang diberi izin bertakhta oleh Sunan Giri, Hadiwijaya pun juga demikian, ia digambarkan melakukan kunjungan atau *sowan* kepada Sunan Giri bersama bala pasukannya.

*“Kacariyos Sultan Pajang bidhal dhatêng ing Giri lan sabalanipun sadaya, Ki Ageng Matawis inggih andhèrèk. Sumêja nyuwun idi anggenipun jumênêng sultan dhatêng Sunan Parapèn. Kala samantên para bupati ing bang wetan sami pêpak wontên ing ngriku sadaya, ing Japan, Wirasaba, Kadhiri, Surabaya, Pasuruan, ing Madura, Sadayu, Lasêm, Tuban, ing Pathi, sarta sami damêl pasanggrahan wontên ing ngriku. Ing satunggil dintên Sunan Parapèn miyos siniwaka, Sultan Pajang sarta para dipati sami lênggah jèjèr, balanipun sami linggih ing wingkinge gustine piyambak-piyambak. Sultan Pajang nuntên katimbangan lênggah cakêt lan Sang pandhita, sarta kamupakatakên anggènipun jumênêng sultan amêngku nagari ing Pajang ajêjuluk Sultan Prabu Awijaya, utawi Sang pandhita inggih sampun angidèni, kala samantên sinêngkalan 1503.”* (BTJ-Jalidu ed. 2014, 71)

“Dikisahkan Sultan Pajang berangkat ke Giri beserta pengiringnya semua, Ki Ageng Mataram (Ki Ageng Pemanahan) juga ikut. Berniat meminta restu untuk menjadi sultan kepada Sunan Prapen. Pada saat itu para bupati di Jawa Timur sudah lengkap di situ semua dari Japan, Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madura, Sedayu, Lasem, Tuban, Pati dan mereka sudah membuat pesanggrahan di situ. Pada suatu hari Sunan Prapen keluar dari kediamannya dan duduk di singgasana, Sultan Pajang dan para adipati kemudian duduk berjejer, pengikutnya pada duduk di belakang tuannya masing-masing. Sultan Pajang kemudian dipanggil untuk duduk di dekat *Sang Pandhita* (Sunan Prapen), kemudian disepakatilah bahwa ia menjadi sultan yang memerintah di Pajang dan berjudul Sultan Prabu Hadiwijaya, dan telah diberi restu oleh *Sang Pandhita*, peristiwa itu bertepatan pada tahun 1503.”

#### 4.1.3. Ramalan Sunan Giri

Legitimasi Mataram atas Sunan Giri pada BTJ mulai menunjukkan tanda-tanda yang jelas ketika masa berkuasanya Hadiwijaya, hal itu dinyatakan dalam sebuah istilah yang bernama “wirayat” atau “ramalan”. Bahkan ramalan itu dalam BTJ tidak muncul di tengah

kisah masa Pajang namun sudah diperingatkan oleh Sunan Giri sesaat setelah Hadiwijaya direstui menjadi sultan Pajang.

*"Para bupati saréng sampun anggènipun sami dhahar, nuntèn kalorodakèn dhatêng para abdi, para abdi inggih lajêng sami nêdha, Sunan Giri sangêt anggènipun mandêng dhatêng Ki Agêng Matawis, sabab Sunan Giri wau sumêrêp ing sadèrènge winarah, nuntèn andangu dhatêng Sultan Pajang, "Thole, baturmu kang mangan ngèrèni iku jênênge sapa?" Sultan Pajang matur, "Punika rencang kula patinggi ing Matawis, ingkang dipun rêh siti wolung atus karya," Raja pandhita ngandika malih, "Timbalana maju, konên linggih jèjèr lan para dipati." Ki Agêng Matawis inggih sampun majêng, raja pandhita ngandika dhatêng para bupati, "Anak inggun para dipati kabèh, wruhanamu turune Ki Agêng Matawis iku besuk bakal angrèh wong satanah Jawa kabèh, sanajan ing Giri kene besuk iya ngidhêp marang ing Mataram." (BTJ-Jalidu ed. 2014, 72)*

"Para bupati setelah mereka makan kemudian memerintahkan pada abadinya masing-masing untuk ikut makan pula. Sunan Giri saat itu sedang memerhatikan dengan cermat kepada Ki Ageng Mataram (Ki Ageng Pemanahan), karena Sunan Giri sudah mengetahui suatu hal sebelum hal itu terjadi, kemudian ia bertanya kepada Sultan Pajang "Nak, temanmu yang makan terakhir itu namanya siapa?", "Itu teman saya yang menjadi petinggi di Mataram, ia memerintah atas tanah seluas 800 karya". Sunan Giri berkata lagi "panggillah ia maju ke sini, dan suruhlah duduk berjejer dengan para bupati". Ki Ageng Mataram sudah maju ke depan, dan Sunan Giri kemudian berkata kepada para bupati "Anak-anakku bupati semua, ketahuilah bahwa keturunan dari Ki Ageng Mataram itu akan memerintah orang tanah Jawa semua, meskipun di Giri sini kelak juga akan takluk pada Mataram."

#### 4.1.4. Berdirinya Mataram

Sesaat setelah kerajaan Mataram didirikan oleh Senapati, BTJ menggambarkan aksi Senapati yang persis seperti dua kerajaan pendahulunya yaitu meminta restu kepada Sunan Giri sekaligus meyakinkan tentang ramalannya dahulu tentang berkuasanya sebuah dinasti di tanah Mataram.

*"Kala samantên Panêmbahan Senapati utusan dhatêng Giri sarta mawi sêrat. Panêmbahan Senapati badhe angyêktosakèn wirayatipun Sunan Giri, kalanipun Sultan Pajang sowan dhatêng Giri rumiyin. Utusan inggih sampun mangkat. Sunan Giri nuju sineba ing balanipun. Utusan saking Matawis lajêng ngaturakèn sêrat. Sunan Giri sasampuning maos sêrat mèsèm sarwi ngandika, "Kongkonan, kowe tutura marang Ki Senapati, yèn arêp anyatakake wirayatku, konên anglurug marang bang wetan. Wirayatku iki wis pinêsthi karsaning Allah, yèn Ratu ing Mataram besuk bakal angrèh wong tanah Jawa kabèh, sanajan ing Giri kene besuk ya têluk marang ing Mataram. Sabab karsaning Allah iku wis ora kêna owah, ginawe jaman walikan. Gusti dadi kawula, kawula dadi gusti, pratandhane wis ana ing Pajang lan ing Mataram iku." (BTJ-Jalidu ed. 2014, 105)*

"Pada saat itu Panembahan Senapati menyuruh seorang utusan ke Giri dengan membawa surat. Panembahan Senapati ingin memastikan kebenaran ramalan Sunan Giri sewaktu Sultan Pajang sowan dahulu. Utusan kemudian berangkat. Kala itu Sunan Giri sedang duduk-duduk dengan abadinya. Datanglah sang utusan kemudian menyampaikan surat. Setelah membaca surat Sunan Giri tersenyum dan berkata, 'Utusan, sampaikanlah pada Ki Senapati, jika mau membuat ramalanku menjadi kenyataan, suruhlah menaklukkan Jawa Timur. Ramalanku ini sudah takdir kehendak

Allah, apabila raja Mataram kelak akan memerintah orang Jawa semua, meski di Giri sini kelak juga akan ditaklukkan Mataram. Sebab kehendak Allah itu sudah tidak dapat diubah-ubah, dibuatlah zaman ini terbalik. Yang tuan menjadi hamba, yang hamba menjadi tuan, contohnya sudah ada, di Pajang dan Mataram itu.”

#### 4.1.5. Penaklukan Jawa Timur

Setelah Mataram tegak berdiri, dengan diawali Panembahan Senapati sebagai raja pertamanya, kemudian dilanjutkan oleh dua orang raja lagi yaitu Panembahan Seda ing Krapyak dan Sultan Agung hingga kemunculan suatu peristiwa yang menggoncangkan Jawa Timur. Peristiwa ini ialah penaklukan Jawa Timur termasuk penaklukan pusat keagamaan tersohor saat itu yaitu Giri Kedhaton yang dalam BTJ disebutkan sebagai berikut:

*“Kacariyos pangeran ing Surabaya kablêmpakan kalihan para bupati bang wetan, kang dèrèng karèh ing Matawis, apirêmbagan sumêja ambêdhah ing Matawis. Sabab sampun lami ènggènipun sami dipun oyak-oyak. Samangke badhe malês angoyak-oyak. Dadosing rêmbag lajêng sami sowan dhatêng ing Giri. Para bupati wau sami anyuwun idi dhatêng Sang pandhita, nanging Sang pandhita botên purun angidini. Karana Sang pandhita sampun sumêrêp ing papêsthèning Allah, yèn nagari ing Matawis badhe angrèh ing tanah Jawi sadaya. Para bupati wau botên kalilan anglajêngna ing pikajênganipun. Mongsa wandea anêmahi karisakan. Nanging para bupati wau amêksa, sabab angandêlakên balanipun kathah sarta sabiyantu kalihan para bupati. Para bupati wau sampun pamit saking Giri, lajêng sami kalêmpakan wontên ing Surabaya, apirêmbagan bab margi kang badhe dènambah. Aturipun kajinêman ing Surabaya, prayogi mêdal ing Madiun. Papanipun radin, mirah wontên pantun, toyanipun kathah.”* (BTJ-Jalidu ed. 2014, 130)

“Dikisahkan Pangeran Surabaya berkumpul bersama para bupati Jawa Timur yang belum ditaklukkan oleh Mataram, mereka berunding tentang niat mereka untuk menaklukkan Mataram. Karena sudah lama mereka dikejar-kejar selama ini. Di kemudian hari mereka akan membalas perbuatan itu. Hasil perundingan tersebut, mereka sepakat untuk sowan ke Giri. Para bupati meminta restu kepada *Sang Pandhita* (Sunan Giri) namun *Sang Pandhita* tidak mau memberikan restu. Karena *Sang Pandhita* sudah mengetahui takdir dari Allah bahwa Mataram kelak akan menaklukkan tanah Jawa semuanya. Para bupati tidak mendapatkan restu untuk melanjutkan keinginan mereka. Daripada mereka akan menerima. Namun para bupati tadi tetap memaksa, karena mereka lebih memercayai bala pasukannya yang banyak serta para sekutunya. Para bupati tadi sudah pamit dari Giri, kemudian berkumpul di Surabaya, mereka berunding tentang jalan yang akan ditempuh. Mata-mata di Surabaya mengusulkan untuk lewat Madiun. Tanahnya rata, padinya (bahan pangan) murah, dan banyak airnya.”

Sedangkan ketika Sultan Agung ingin menaklukkan Giri, BTJ menggambarkan ia saat itu sedang sakit hati karena ada satu wilayah di Jawa Timur yang belum ia taklukkan. Untuk itu ia mengutus adik iparnya untuk segera menaklukkan Giri.

*“Sadhatêngipun ing ngarsane Kangjêng Sultan, Ratu Pandhansari matur, ‘Kakang Prabu, panjênêngan dalêm gêrah punapa? Dene ènggènipun animbali ing kula enggal-enggalan.’ Kangjêng Sultan alon angandika, ‘Laraningsun panggonane ing ati, Adhi Ajêng. Larane atiningsun angluwihi bangêt. Dene ana pandhita siji durung nungkul marang ingsun. Omahe ing Giri. Liyane iku wong tanah Jawa wis padha nungkul kabèh. Sira tutura marang lakinira, ing Giri sun tênguhakên marang*

*dhèwèke, supaya bisaa anungkul marang ingsun. Kang prayoga angrusak ing Giri amung lakinira, karana padha trahing pandhita.*” (BTJ-Jalidu ed. 2014, 140)

“Setiba di dekat Sultan Agung, Ratu Pandhansari berkata, ‘Kakang prabu, Anda sakit apa? Kok kelihatan terburu-buru Anda memanggil saya.’ Sultan Agung kemudian berkata dengan pelan, ‘Sakitku ini tempatnya di hati, adikku sayang. Sakitku ini rasanya sangat sakit. Bahwa masih ada satu orang rohaniwan yang belum takluk kepadaku. Rumahnya di Giri. Lainnya orang tanah Jawa sudah pada takluk semua. Kau bilang pada suamimu, perangilah Giri, agar dapat takluk kepadaku. Karena yang pantas untuk menaklukkan Giri hanyalah suamimu, karena sama-sama keturunan dari rohaniwan.’”

#### 4.1.6. Sunan Amangkurat II

Dalam BTJ edisi Meinsma ini Sunan Giri untuk terakhir kali muncul dalam hal legitimasi pada masa Susuhunan Amangkurat II. Setelah penumpasan Trunajaya, Sunan Amangkurat mengutus Mangunjaya untuk meminta restu atas kekuasaannya ke Giri.

*Sang Nata nuntèn adhèdhawah dhatèng Radèn Mangunjaya, kautu dhatèng ing Giri anyuwun idi ènggènipun jumènèng Nata dhatèng Sang pandhita sarta nyuwun dhuwung wasiyat ing Giri, kang nama Kyai Kala Munyèng. Radèn Mangunjaya enggal lumampah, sampun kèpanggih kalihan Sang pandhita, andhawuhakèn timbalan saha ing pamundhutipun Sang Prabu. Sang pandhita lajèng pitakèn. "Mangunjaya, kang jènèng Sunan Mangkurat iku sapa? Apa trah Mataram apa dudu? Pawartane wong akèh anake Amral. Iku apa nyata? Yèn dhasar trah Mataram ya dakidini ènggone jumènèng Nata. Yèn nyata anake Amral turuning wong sabrang, aku ora gèlèm angidini."* (BTJ-Jalidu ed. 2014, 204)

Sang raja kemudian memerintahkan kepada Raden Mangunjaya, ia diutus ke Giri untuk meminta restu menjadi raja kepada *Sang Pandhita* (Sunan Giri) serta meminta keris pusaka di Giri, yang bernama Kyai Kalam Munyeng. Raden Mangunjaya kemudian segera berangkat, dan ketika sudah bertemu dengan *Sang Pandhita* segera menyampaikan pesan dan keinginan dari Sang Prabu. *Sang Pandhita* kemudian bertanya “Mangunjaya, yang bernama Sunan Mangkurat (II) itu siapa? Apakah masih dari trah Mataram? Karena kabar dari orang banyak ia putra dari Amral (Sunan Amangkurat I). Benarkah itu? Kalau memang trah Mataram ya saya beri restu untuk bertakhta. Namun kalau ia anak dari Amral keturunan orang seberang (Belanda) aku tidak mau memberi restu”

## 4.2. DISKUSI

Narasi-narasi mengenai legitimasi Sunan Giri dalam BTJ dijelaskan lengkap pada setiap zaman berdirinya monarki pada periode Islam di Jawa, mulai dari Demak, Pajang hingga Mataram. Bahkan ketika Demak belum berdiri dan saat itu masih pada masa transisi dengan peristiwa runtuhnya Majapahit, sosok Sunan Giri dalam BTJ sudah muncul mengawali kronologi legitimasi. Sosok Sunan Giri sebagai pemberi legitimasi utama dari kalangan rohaniwan Islam dalam BTJ tidak bisa dipungkiri berasal dari kemahsyuran Giri Kedhaton yang didirikan oleh Sunan Giri I (Raden Paku) pada tahun 1486 M. Pada abad ke-15 hingga ke-17 M keberadaan Giri Kedhaton menjadi pusat hegemoni religius yang paling berpengaruh, khususnya di wilayah yang berkebudayaan Jawa yaitu Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Persamaan akan nilai-nilai kultural ditambah dekatnya faktor geografis tersebut menjadikan entitas politik-religius di timur Surabaya itu dijadikan rujukan dalam pengabsahan monarki-monarki Jawa pasca runtuhnya Majapahit sejak Demak, Pajang, kemudian Mataram.

Kita mengenal sosok “brahmana”, khususnya pada periode Hindu-Budha, sosok rohaniwan yang memiliki kuasa nomor satu dari seluruh kasta pada masa tersebut. Di bawah kekuasaan brahmana itu ada kasta ksatriya yang merupakan golongan para bangsawan dan politikus, dalam hal ini termasuk seorang raja. Dalam memerintah sebuah negeri seorang raja mendapat restu dan bimbingan dari brahmana, sehingga dalam catatan sejarah sosok tersebut selalu dimuliakan dengan berbagai macam perlakuan istimewa yang tertuju padanya. Pada masa Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman ia menghadiahkan 1000 ekor lembu untuk para brahmana sebagai penutup dari kegiatan penggalian sungai untuk pengairan di musim hujan seperti tercatat dalam prasasti Tugu (Soekmono 1981, 36). Kemudian pada prasasti Dinoyo di masa Kanjuruhan yang mengisahkan pendirian-pendirian bangunan untuk para brahmana dalam upacara pendirian arca Agastya (Soekmono 1981, 42). Pada masa Majapahit, kedudukan brahmana sepertinya semakin dimuliakan, seperti terlihat dengan adanya penyediaan berbagai tempat pertapaan untuk para resi hingga pembentukan pejabat khusus yang bernama *mantri er haji* untuk mengaturnya (Munandar 2018, 195-196). Selain itu juga ada pembentukan pejabat-pejabat keagamaan khusus seperti *dharmmadyaksa ring kasaiwan* untuk penganut agama Siwa dan *dharmmadyaksa ring kasogatan* untuk penganut agama Budha (Munandar 2008, 14). Namun dari beberapa contoh pemuliaan para rohaniwan tersebut terdapat satu contoh kisah yang menunjukkan adanya pemaksaan secara radikal kepada rohaniwan seperti yang terjadi saat peristiwa pra munculnya Singhasari seperti yang tercatat dalam Pararaton (Brandes 1920, 18). Saat itu Arok merebut kekuasaan atas Tumapel bertepatan dengan kekisruhan antara raja dan pendeta di istana Daha, maka banyak pendeta yang melarikan diri dan diterima di Tumapel (Soekmono 1981, 61). Hal ini disebabkan Raja Kertajaya mendeklarasikan dirinya sebagai Bhatara Guru (Siwa) dan meminta para pendeta untuk menyembahnya, namun sesuai tradisi, tidak ada yang namanya seorang raja disembah sebagai dewa. Oleh karena itu, mereka lari ke Tumapel. Rahardjo menafsirkan hal tersebut sebagai tanda kemunculan kecenderungan raja untuk mendesak peranan kaum pendeta di istana (Rahardjo 2011, 147).

Dari uraian di atas jelas menggambarkan bagaimana peranan rohaniwan dalam mengukuhkan posisi bangsawan saat itu. Betapa penting posisi mereka hingga dikisahkan Prabu Kertajaya memaksa para pendeta untuk menyembahnya. Kisah dalam Pararaton tersebut sudah menunjukkan simbol dari besarnya hegemoni agamawan pada istana. Bertumpu pada uraian itu, kejadian di masa setelahnya tidak jauh berbeda di mana para wali yang umumnya bergelar “sunan” menjadi tokoh utama baik dalam kasus konversi agama di Jawa pada abad ke-13 hingga abad ke-15 M. Selain itu, para wali itu juga dianggap sebagai sosok yang dituakan dan dimuliakan karena memiliki ilmu agama yang lebih dan juga sebagai pemilik otoritas religius-politis yang sangat berpengaruh di tanah Jawa pada saat itu. Secara umum para wali yang cukup memiliki nama di tanah Jawa ini disebut sebagai Walisongo. Istilah umum di masyarakat itu merujuk kepada wali-wali masyhur yang berjumlah sembilan, yang berasal dari beberapa periode yang berbeda, seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Namun juga ada pendapat bahwa makna Walisongo ini merupakan penurunan dari konsep kosmologi di masa Hindu-Budha tentang sembilan dewata penjaga arah mata angin dan satu penjaga arah pusat yang kemudian disamakan dan menjadi sembilan tingkatan kewalian (Sunyoto 2017, 146-147). Para wali yang mendapat tempat paling banyak dalam BTJ ialah Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Giri. Dari keempat sunan yang banyak tampil dalam berbagai peristiwa kenaikan seseorang menjadi raja di tanah Jawa ialah Sunan Giri. Tampilnya “Sunan Giri” sebagai pemberi legitimasi utama dalam BTJ sangat kuat bertumpu kepada masyhurnya entitas politik yang ia miliki yaitu Giri Kedhaton. Sunan-sunan seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus yang juga rutin tampil dalam BTJ aksinya tidak sesering aksi-aksi dari Sunan Giri dalam memberi pengabsahan pada suatu entitas politik.

Pengaruh Sunan Giri sebagai rohaniwan sangat terkait dengan entitas politiknya yaitu Giri Kedhaton yang didirikan pada 1486 M (Mustakim 2005, 50). Entitas ini bertahan selama kurang

lebih dua setengah abad, hingga pemimpin terakhirnya yang bernama Pangeran Puspa Ita (1660-1680) (Mustakim 2005, 61). Artinya masa kekuasaan Giri Kedhaton meliputi hampir seluruh masa kekuasaan Demak-Pajang-Mataram di tanah Jawa.

Seperti telah diulas di atas, bahwa pemimpin atau raja-ulama dari Giri Kedhaton selalu dipukul rata dengan sebutan “Sunan Giri” dalam BTJ. Padahal secara umum sebutan “Sunan Giri” ini hanya merujuk pada pendiri Giri Kedhaton yaitu sosok yang dikenal dengan Raden Paku atau Prabu Satmata. Oleh karena itu, kemudian lahirlah istilah Sunan Giri yang diikuti oleh penomoran setelahnya seperti Sunan Giri I, Sunan Giri II, Sunan Giri III dan seterusnya.

Dari sisi genealogi keilmuan, Sunan Giri I sebagai pendiri entitas tersebut termasuk murid dari ulama Malaka seperti Maulana Ishaq yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Selain itu, beliau juga murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri I sempat belajar ke Malaka sebelum ia meneruskan perjalanannya ke Mekah bersama Sunan Bonang. Dari ajaran tasawuf yang diajarkan dari ayahnya, Sunan Giri I diketahui pula sebagai guru tarekat aliran Syathariyah (Sunyoto 2017, 218). Nama Sunan Giri I juga tak lepas dengan keislaman Kesultanan Ternate di Maluku, seorang muballigh bernama Dato’ Maula Husein yang merupakan seorang Minangkabau yang sempat bermukim di Gresik, menjadi pendakwah yang berhasil mengislamkan raja Ternate yang bernama Kolano Marhum. Dari keislamannya ia berhasil membuat keluarga terdekatnya dan pejabat-pejabat lainnya memeluk Islam pula. Penggantinya yang bernama Zainal Abidin menjadi raja Ternate pertama yang menggunakan gelar ‘sultan’, selain itu pada tahun 1495 M dengan diantar Dato’ Maula Husein, Zainal Abidin menuju Gresik dan berguru kepada Sunan Giri selama tiga bulan (Amal 2016, 64).

Setelah wafatnya Sunan Giri I (Raden Paku) ia digantikan oleh Sunan Giri II atau Sunan Dalem. Pada masa Sunan Dalem ini Giri Kedhaton nampak mulai melakukan konsolidasi kekuatan dengan sibuk menghadapi peperangan baik dengan kerajaan di pedalaman maupun di pesisir (Anam dkk 2013, 116). Setelah wafatnya Sunan Dalem ia digantikan oleh Sunan Giri III atau Sunan Seda Margi. Sunan Seda Margi kemudian digantikan oleh Sunan Giri IV atau Sunan Prapen. Pada masa Sunan Prapen ini Islam masuk ke Lombok, Sunan Prapen datang ke Pulau Lombok dengan membawa sejumlah pengiring dan ulama-ulama dari Jawa. Salah satu di antaranya ada yang pandai memainkan wayang. Agama Islam menyebar di Lombok melalui komunikasi pewayangan. Wayang itu menceritakan tentang pahlawan Islam seperti Amir Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan para pahlawan Badar (Asnawi 2005, 5). Di masa yang sama, murid utusan dari Giri lainnya seperti Dato’ Ri Bandang, Dato Ri Tiro dan Dato’ Patimang turut pula menjadi agen islamisasi di tanah Sulawesi tepatnya di Kerajaan Gowa-Tallo (Effendy 2013, 22). Sedangkan setelah kepemimpinan Sunan Prapen ini, raja-ulama di Giri sudah tak disebut “sunan”, namun dengan sebutan “panembahan” (Mustakim 2005, 58). Kebesaran Giri Kedhaton tidak berlangsung lama, di masa setelah Sunan Prapen kerajaan tersebut kemudian dipimpin oleh para “panembahan” seperti Panembahan Kawisguwa (1506-1616), dan kemudian pada masa Panembahan Agung (1516-1636) Giri Kedhaton takluk di bawah kekuasaan Mataram.

Kebesaran dan kemahsyuran Giri Kedhaton yang tak hanya berpengaruh di Pulau Jawa bahkan hingga kepulauan Nusantara di timur itu menjadikan kerajaan ini disegani oleh berbagai kalangan. Hal yang sangat penting ialah bahwasanya kerajaan tersebut merupakan kerajaan religius yang dipimpin oleh orang-orang suci. Oleh karena itu, tidak heran apabila dalam BTJ sosok “Sunan Giri” sebagai pemilik hegemoni religius di Jawa dan sekitarnya banyak disebut dan menjadi pemberi legitimasi kekuasaan kerajaan-kerajaan pasca Majapahit, khususnya kerajaan Mataram. Apabila melihat dari keseluruhan kronologi hadirnya Sunan Giri dalam BTJ, akan didapatkan bahwa mayoritas narasi tentang Sunan Giri hadir pada peristiwa Mataram. Contoh di atas dapat dijelaskan menjadi tujuh poin tentang berita Sunan Giri dalam BTJ, enam di antaranya sudah menyinggung Mataram. Kemudian dihubungkan mengenai kesejarahan BTJ sebagai kitab sastra sejarah Mataram yang telah diulas dalam tinjauan pustaka bahwa hal itu untuk mengabsahkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, banyak kronologi atau peristiwa dalam BTJ yang perlu

mendapat kajian ulang karena kurang mendapat dukungan dari sumber lainnya yang dapat membuktikan sebagai fakta historis. Namun, terlepas dari itu, sebenarnya BTJ dapat digunakan sebagai sumber primer utama dalam studi sejarah Jawa periode Mataram dan tidak semua kronologi dalam BTJ itu ahistoris. Catatan kronologi-kronologi tersebut cocok disandingkan dengan sumber lainnya seperti yang telah dikerjakan oleh Graaf dalam beberapa karyanya tentang Kerajaan Mataram.

Narasi mengenai Sunan Giri yang bisa jadi tidak menunjukkan adanya unsur legitimasi dalam BTJ terletak pada kronologi Demak tentang permusuhan antara Giri dan Majapahit, bahkan kisahnya bisa jadi fakta sejarah. Seperti yang dikutip oleh Graaf, Tome Pires mencatat adanya serangan terhadap Kajongan atau Juwana oleh Majapahit. Diperkirakan serangan ke Juwana ialah satu paket dengan serangan ke Giri mengingat dari segi geografis mereka terletak di pesisir utara. Namun untuk kronologi ketika Majapahit sudah diduduki Giri, di sini sudah muncul unsur legitimasi. Saat itu Sunan Giri melakukan ritual selama 40 hari untuk membersihkan unsur kekafiran di istana Majapahit. Graaf menyebut hal tersebut sebagai usaha untuk menonjolkan posisi Giri karena data itu tidak dapat dibandingkan dengan data lainnya (Graaf 1986, 182). Kisah itu berangkat ketika Raden Patah ingin segera bertakhta setelah runtuhnya Majapahit, namun Sunan Giri menundanya karena ia ingin menetralsir istana terlebih dahulu. Baru ketika sudah 40 hari ia boleh bertakhta. Untuk itu bisa ditarik benang merah bahwa melalui peristiwa tersebut diperkirakan sudah masuk campur tangan narasi legitimasi Mataram. Kisah tentang “penetralsiran” istana Majapahit selama 40 hari oleh Sunan Giri dalam BTJ membuat citra tentang kesaktian sosok rohaniwan yang berpengaruh saat itu.

Oleh karena itu pada kronologi selanjutnya sosok Sunan Giri hadir kembali ketika Hadiwijaya naik takhta di Pajang. Ia berniat pergi ke Giri untuk mendapatkan restu dari Sunan Giri. Setelah mendapatkan restunya, secara gamblang Sunan Giri memberikan suatu ramalan yang menggambarkan bahwa kelak akan ada seorang raja yang bertakhta di tanah Mataram yang akan menggantikan posisi Pajang saat itu. Ketika itu ada sebuah peristiwa permusuhan antara Arya Penangsang dengan Ratu Kalinyamat, Hadiwijaya diutus untuk segera menghabisi Arya Penangsang oleh Kalinyamat, namun karena ia takut maka ia mengutus dua orang yang bernama Ki Ageng Penjawi dan Ki Ageng Pamanahan untuk mengalahkan Penangsang dengan janji tanah di Pati dan Mataram. Ketika mereka berhasil memenangkan pertempuran atas Arya Penangsang maka tanah Pati segera diberikan kepada Ki Ageng Penjawi, namun Mataram tidak segera diberikan pada Ki Ageng Pamanahan. Dalam BTJ Hadiwijaya diilustrasikan sangat takut dengan ramalan Sunan Giri, apabila tanah itu diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan berarti ia harus merelakan kerajaannya kelak. Namun akhirnya karena desakan gurunya yaitu Sunan Kalijaga ia segera menyerahkannya kepada Ki Ageng Pamanahan. Pada kronologi selanjutnya, ketika Mataram sudah ditempati dan Sutawijaya menjadi raja pertamanya, dengan saran Tumenggung Mancanegara dan Adipati ia diminta untuk segera memusnahkan Sutawijaya yang tidak segera sowan ke Pajang, namun dengan uniknya BTJ dengan jelas menyebut Hadiwijaya sangat pasrah kepada Allah. Ia berkata: *“Ingsun wèdi ing Allah, lan wis pinèsthi karsa Allah, yèn ing Mataram bakal ana kang jumênêng ratu gédhe, angrèh wong sa tanah Jawa kabèh, kapriye ènggonira anêkerah?”* (BTJ Jalidu 2014, 87) (Aku takut kepada Allah dan sudah ditakdirkan oleh kehendak Allah, bahwa di Mataram kelak akan ada yang menjadi raja besar, memerintah orang setanah Jawa semua, bagaimana kau bisa mengelak?)

Kemunculan Sunan Giri pada periode Demak, khususnya pada saat penetralsiran istana Majapahit dan penobatan Raden Patah menjadi embrio legitimasi Mataram dalam BTJ. Kemudian ketika Pajang naik ke panggung sejarah, embrio tadi mulai berkembang dan kemudian sangat gamblang menunjukkan adanya keberpihakan pada dinasti Mataram. Terutama pada dua narasi terakhir di atas, yaitu mengenai ketakutan Hadiwijaya untuk segera menyerahkan tanah Mataram pada Penangsang dan pasrahnya Hadiwijaya kepada Allah bahwa kelak memang Pajang akan dikuasai Mataram. Keterangan itu sangat terlihat untuk menguatkan narasi sebelumnya yaitu

ramalan Sunan Giri yang sudah hadir ketika Hadiwijaya dinobatkan menjadi raja. Dan kemudian di saat Senapati sudah menjadi raja di Mataram dan berhasil memberontak kepada induknya yaitu Pajang, Senapati pun dalam BTJ melakukan hal yang sama meskipun ada sedikit perbedaan. Dan alur legitimasi itu kisahnya sangat runtut, Senapati mengirim utusannya ke Giri, dan menanyakan tentang ramalan Sunan Giri di masa Pajang apakah benar. Redaksi BTJ pun dengan sangat jelas menunjukkan keberpihakan Mataram, apabila dalam kasus Pajang dikisahkan Hadiwijaya sangat pasrah kepada Allah bahwa tanahnya kelak akan diduduki Mataram, kali ini gantian Sunan Girilah yang pasrah, seolah-olah ia rela kerajaannya diduduki Mataram kelak. Dalam BTJ disebutkan: “*Wirayatu iki wis pinêsthi karsaning Allah, yèn Ratu ing Mataram besuk bakal angrèh wong tanah Jawa kabèh, sanajan ing Giri kene besuk ya têluk marang ing Mataram.*” (Jalidu 2014, 105) (Ramalanku ini sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah, bahwa raja Mataram kelak akan memerintah orang setanah Jawa semua, meski di Giri sini kelak juga ditaklukkan Mataram)

Bisa jadi narasi mengenai pasrahnya Sunan Giri pada saat utusan Senapati mengonfirmasi masalah ramalannya tentang berkuasanya dinasti Mataram merupakan legitimasi yang kemudian dibuat setelah peristiwa sejarah penaklukan Giri pada tahun 1636 (Graaf 1986, 224). Pada saat Sultan Agung naik takhta pada tahun 1613 ia melanjutkan program-program ekspansi yang telah didahului oleh dua raja sebelumnya yaitu Panembahan Senapati dan Panembahan Seda ing Krapyak. Sebelum menaklukkan Giri, ia terlebih dahulu menaklukkan daerah-daerah di pinggir Surabaya, hal itu sebagai taktik untuk mengepung Surabaya. Wirasaba di selatan ditaklukkan pada 1615, Pasuruan pada 1617, kemudian Tuban pada 1619 dan terakhir Madura pada 1624. Maka praktis terkepunglah Surabaya dari berbagai sisi, kemudian takluk pada 1625 (Ricklefs 2008, 62-63). Dengan dikuasainya Surabaya pada tahun 1625, otomatis kekuatan Jawa Timur dapat dikendalikan. Selanjutnya Sultan Agung memboyong Pangeran Pekik dari Surabaya ke Mataram, lalu ia nikahkan dengan adiknya yang bernama Pandhan Sari (Graaf 1986, 217). Taktik yang cukup cerdas itu membawa kepada jawaban mengapa saat itu Giri tidak ditaklukkan sekalian. Dan selanjutnya Pangeran Pekik ini diutus Sultan Agung ke Giri untuk menaklukkan mereka. Dalam BTJ dijelaskan bahwa Pangeran Pekik merupakan *trah pandhita* atau keturunan dari rohaniwan. Graaf mengatakan bahwa memang Pekik keturunan dari Sunan Ampel (Graaf 1986, 220). Jadi Sultan Agung menggunakan *trah pandhita* untuk menaklukkan *pandhita*. Dan pada akhirnya takluklah Giri pada tahun 1636. Peristiwa takluknya Giri ini diperkuat dengan digunakannya gelar *susuhunan* oleh Sultan Agung yang berkonotasi religius pada tahun-tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 1624 (Graaf 1986, 132). Tujuan Sultan Agung menaklukkan Giri dan menggunakan gelar *susuhunan* ini dalam rangka mendapatkan pengaruh religius yang pada saat itu gelar tersebut sangat identik dengan gelar para rohaniwan atau para wali. Maka narasi pasrahnya Sunan Giri dalam BTJ bisa jadi legitimasi untuk kekuasaan Sultan Agung pada tahun 1636. Ia melegalkan aksinya melalui narasi bahwa Sunan Giri sendirilah yang mengizinkannya menaklukkan Giri lewat ramalan Sunan Giri pada masa Pajang dalam BTJ.

Pada akhirnya riwayat sosok Sunan Giri dalam BTJ tersebut berakhir di episode Sunan Amangkurat II. Pada saat itu dikisahkan Sunan Amangkurat II meminta Mangunjaya untuk pergi ke Giri, seperti biasa tidak lain untuk meminta restu, namun satu lagi yang berbeda dari kisah-kisah permintaan restu pada masa sebelumnya. Pada episode ini juga ada permintaan lain yaitu permintaan sebuah keris pusaka yang bernama Kalam Munyeng. Peristiwa itu berakhir dengan didudukinya Giri dan tewasnya Pangeran Singasari, karena ketika Mangunjaya ditanya oleh Sunan Giri apakah yang meminta restu itu keturunan Mataram atau bukan, Mangunjaya menjawab tidak tahu. Maka Sunan Giri tidak memberikan izinnya dan seperti itulah akhirnya. Hal aneh yang dapat disaksikan dalam narasi tersebut ialah Sunan Giri tidak memberikan izin dan Mangunjaya digambarkan seorang utusan yang tidak tahu asal usul rajanya. Hal ini sangat aneh seorang utusan kerajaan tidak tahu asal muasal tuannya, padahal sangat jelas bahwa Amangkurat II ialah keturunan dinasti Mataram. Mengapa BTJ membuat narasi seperti itu, padahal di awal selalu digambarkan bahwa Sunan Giri selalu merestui raja yang berkuasa, dan penulis BTJ sepertinya memang sengaja

menulis Mangunjaya tidak tahu. Hal tersebut tentunya dapat dibaca melalui fakta kondisi sosio-politik saat itu ketika Pemberontakan Trunajaya pecah. Pasukan Trunajaya saat itu menaklukkan daerah pesisir, ia juga menggaungkan seruan pemberontakan atas nama Islam yang kemudian mendapatkan dukungan khususnya dari Giri. Panembahan Giri saat itu menyatakan bahwa umur Mataram tidak akan berlangsung lama karena kehadiran VOC di Jawa (Ricklefs 2008, 103). Selain itu Graaf menyatakan bahwa raja ulama Giri itu melawan aliran yang pro-Belanda bahkan penerimaan gelar *panembahan* yang diterima oleh Trunajaya itu diduga didapatkan pula dari Giri (Graaf 1987, 115-116). Pernyataan De Klerk dalam *History of The Netherlands East Indies* memperkuat bahwa Giri sangat mendukung aksi pemberontakan Trunajaya. Hal itu disebabkan karena pada tahun 1660 Sunan Mataram telah menurunkan reputasi dan pengaruh keluarga besar mereka (De Klerk 1938, 283). Di sini kita mendapati bahwa Giri sudah bebas dari pengaruh Mataram serta jelas di mana keberpihakannya. Oleh karena itu ketika Trunajaya ditangkap di Gunung Kelud dan dibunuh oleh Amangkurat II, segera ia memulihkan dan mengonsolidasi wilayah-wilayah Mataram yang sebelumnya lepas karena peristiwa Pemberontakan Trunajaya. Dan ini masuk akal dengan kisah di atas, bahwa ketidaktahuan Mangunjaya mengenai asal-usul rajanya ketika ditanya oleh Sunan Giri akan berujung tidak diberikannya restu, dan hal itulah yang menjadi legitimasi Amangkurat II dalam BTJ untuk menyerang Giri. Jadi Amangkurat II sebenarnya memang sengaja menyerang Giri, namun dalam BTJ seolah-olah diberitakan bahwa karena Sunan Girilah yang menjadi penyebabnya karena tidak memberikan restu takhta kepada Amangkurat II yang kemudian menyebabkan Amangkurat II menyerang Giri, padahal apa yang tercantum pada BTJ itu belum tentu benar. Dan yang jelas legitimasi kisah dalam BTJ tadi sangat berkaitan dengan peristiwa sejarah runtuhnya Giri yang dalam *Neerlands Indië* disebutkan Pangeran Giri terbunuh pada April tahun 1680 (Stibbe 1935, 326). Sedangkan dalam *History of The Netherlands East Indies* dijelaskan bahwa Sunan Amangkurat II mengirimkan Kapten Altmeyer untuk menyerang Giri dan membunuh Pangeran Giri beserta keluarganya dan peristiwa itu menandai berakhirnya pengaruh Giri di Jawa (De Klerk 1938, 294). Jika berpedoman pada daftar penguasa Giri dari Wiselius, maka bisa disimpulkan pemimpin Giri yang tewas dalam serangan VOC pada tahun 1680 ialah Pangeran Puspa Ita (Mustakim 2005, 61).

#### 4. KESIMPULAN

Munculnya penarasian Sunan Giri dengan kekuasaan Mataram dalam BTJ tidak lain dilatarbelakangi oleh faktor besarnya pengaruh religius Giri di tanah Jawa pada rentangan abad ke-15-17 M. Dalam narasi tersebut Sunan Giri mulai nampak memperlihatkan dukungannya kepada kerajaan-kerajaan pasca runtuhnya Majapahit yang diawali oleh Demak. Dukungan ini dalam BTJ dikisahkan terus mengalir hingga pasca runtuhnya Demak yang dalam bentuk ramalan-ramalan mengenai akan tegaknya sebuah dinasti yang besar di kemudian hari, yaitu Mataram. Ketika naiknya Hadiwijaya menjadi raja Pajang, dalam BTJ tidak hanya menampilkan narasi perestuan takhta oleh Sunan Giri namun juga telah dibarengi dengan narasi ramalan tentang Mataram. Restu dari Sunan Giri muncul kembali ketika Panembahan Senapati menagih janji ramalan tentang tegaknya Mataram kelak. Tidak sampai di situ, ketika Sultan Agung memerintah pun, uniknya BTJ menyebutkan bahwa Sunan Giri malah mendukung penaklukan Jawa Timur demi kejayaan Mataram. Bahkan ketika Sunan Amangkurat II berkuasa sosok Sunan Giri dalam BTJ masih disebut dan dimintai restunya untuk kekuasaan Amangkurat II, namun hal tersebut sebagai alasan saja yang sebenarnya digunakan untuk legitimasi kasus penyerangan Giri pada tahun 1680 M. Melihat narasi-narasi terkait Sunan Giri dalam BTJ yang telah diabadikan oleh para carik istana Mataram tersebut memang ditujukan untuk memperbesar dan mengabsahkan kekuasaan raja-raja Mataram, yang terlepas dari benar atau tidaknya fakta sejarah yang ditulis tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., Suwandi, Widji. *Giri Kedhaton: Kuasa Agama dan Politik*. Surabaya: Kalidaya. 2013.
- Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-Rempah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). 2016.
- Asnawi. "Respons Kultural Masyarakat Sasak terhadap Islam." *Ulumuna*, Vol.9,1 (2005): 1-19.
- Birsyada, Muhammad Iqbal. "Budaya Keraton pada Babad Tanah Jawi dalam Perspektif Pedagogi Kritis." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vo.10, 2 (2016): 174-185.
- Chalik, Abdul. "Wali, Sultan, Kiai dan Santri dalam Tradisi Agama dan Politik Islam Jawa." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.6, 1 (2016): 139-167.
- Effendy, Muslimin A. R (ed). *Monumen Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Penerbit Identitas UNHAS. 2013.
- Graaf, H. J. *Puncak Kekuasaan Mataram*. Jakarta: Pustaka Grafitipers. 1986.
- \_\_\_\_\_. *Runtuhnya Istana Mataram*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1987.
- Graaf, H. J., dan TH. Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Kajian 'Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*. Jakarta: Pustaka Grafitipers & KITLV. 1986.
- \_\_\_\_\_. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2001.
- Jalidu, Ahmad (ed). *Serat Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2014.
- Klerk, E. S. de. *The History of The Netherlands East Indies*, Vol. I. Rotterdam: W. L. & J. Brusse N. V. 1938.
- Moedjanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Mukarrom, Ahwan. *Sejarah Islam Indonesia I*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Munandar, Agus Aris. *Ibukota Majapahit Masa Jaya dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Wilwatikta Prana, Kajian Arkeologi-Sejarah Zaman Majapahit*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2018.
- Mustakim. *Gresik: Sejarah Bandar Dagang & Jejak Awal Islam Tinjauan Historis Abad XIII-XVII M*. Jakarta: CV. Citra Unggul Laksana. 2005.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rahardjo, Supratikno. *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno hingga Majapahit Akhir*. Depok: Komunitas Bambu. 2011.
- Ras, J. J. "The Genesis of the Babad Tanah Jawi; Origin and Function of the Javanese Court Chronicle." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 143, 2 (1987): 343-356.
- \_\_\_\_\_. *Masyarakat dan Kesusastraan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since C. 1200*. New York: Palgrave Macmillan. 2008.
- Schrike, B. *Indonesian Sociological Studies*. Den Haag & Bandung: W. van Hoeve Ltd. 1957.

Soedjatmoko (ed). *An Introduction to Indonesian Historiography*. Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia. 2007.

Soekmono. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1981.

Stibbe, Prof. D.G. & H. Colijn (ed). *Neerlands Indië. Land en Volk - Geschiedenis en Bestuur - Bedrijf en Samenleving*, edisi I. Amsterdam: Elsevier. 1935.

Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN. 2017.

Zamzami, Rizal. "Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-1601." *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol.2, 2 (2018): 154-165.